



BAB

8

KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam perwujudan visi dan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip “SMART”, yaitu (1) khusus (*specific*) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu; (2) dapat diukur (*measurable*) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori ; (3) dapat dicapai (*achievable*) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi; (4) relevan (*relevant*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi; (5) masa waktu (*time-bound*) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (*output*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Penetapan indikator kinerja daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten/Kota; serta sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan sebagai berikut.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa bakti 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian selam lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran dari setiap misi yang disajikan dalam Tabel 8.1:



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Malinau

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
INDIKATOR TUJUAN										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	71,94	72,52	72,85	73,18	73,51	73,84	74,17	74,17
2	Indeks Ketahanan Nasional	poin	2,65	2,7	2,75	2,78	2,8	2,82	2,85	2,85
3	Pertumbuhan PDRB	persen	-0,62	2,0-4,0	3,0-5,0	5,28	5,54	5,86	6,17	6,17
4	Indeks Gini	poin	0,289	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	0,278
5	Angka Kemiskinan	persen	6,63	7,30	6,5-6,75	6-6,5	5,5-6,5	5,5-6	5,5-6	5,5-6
6	Laju Inflasi	persen	1,32	0,39	0,36	0,33	0,3	0,27	0,24	0,24
7	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	poin	N/A	3,5-4,5	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,77	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35
9	Indeks RB	poin	CC	B	B	B	B	B	BB	BB
INDIKATOR SASARAN										
1	Angka Usia Harapan Hidup	persen	71,45	71,84	71,94	72,05	72,16	72,27	72,38	72,38
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	poin	9,39	9,07	9,37	9,67	9,97	10,27	10,57	10,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,08	4,14	4,24-5,14	4,35-5,25	4,44-5,34	4,55-5,45	4,64-5,54	4,64-5,54
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	70,78	72,21	73,65	75,09	76,52	77,96	79,4	79,4
5	Angka kriminalitas yang	persen	100	100	100	100	100	100	100	100



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	tertangani									
6	Indeks Resiko Bencana	poin	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4	124,4
7	Indeks Pembangunan Gender	poin	81,36	82,36	83,36	84,36	85,36	86,36	87,36	87,36
8	Indeks Kerukunan Beragama	poin	78		79,25	80,6	81,7	82,8	83,3	83,3
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat	poin	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	82,5
10	Kontribusi Pertanian dalam arti luas (Tnp, Holti, Ternak, Perikanan) Terhadap PDRB (%)	persen	3,79	4,8	4,82	4,9	4,92	4,95	5	5
11	Nilai Tukar Petani	poin	102,86	103,59	103,65	103,7	103,8	103,85	103,9	103,9
12	Nilai Tukar Peternak	poin	103,11	103,15	103,2	103,25	103,3	103,35	103,4	104,4
13	Nilai Tukar Nelayan	poin	102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	103,05
14	Kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB	persen	2,56%	2,60%	2,70%	2,70%	2,80%	3,00%	3,00%	0,03
15	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	1.82%	1.82%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%
16	Persentase Koperasi berkualitas	persen	65%	66%	70%	72%	74%	75%	80%	80%
17	Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	persen	52,50%	55,40%	70,60%	73,30%	76,60%	83,30%	100%	100%
18	Nilai Investasi daerah	rupiah	92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94.000.000.000
19	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	persen	49,70%	45,10%	50,0%	52,1%	54,8%	59,6%	64,4%	64,4%



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
20	Persentase daerah/wilayah banjir	persen	1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
21	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	persen	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
22	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	persen	57%	62%	67%	72%	77%	82%	87%	87%
23	Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	persen	25,78	27,3	28,01	30,34	32,46	34,69	36,92	36,92
24	Pesentase Pemukiman Yang Layak	persen	73,03	76	77	79	80	81	81,97	81,97
25	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	4:05	4:05	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09	7:09
26	persentase wilayah yang terlayani TIK	persen	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18
28	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	poin	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	poin	50	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
30	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	poin	94	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
31	Predikat SAKIP	poin	N/A	B	B	B	B	B	BB	BB
32	Nilai LPPD	poin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
33	Opini BPK	poin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	4	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	C	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
36	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (desa)	persen	8,26	11,93	13,76	15,59	17,74	19,22	21,05	21,05

Sumber : data diolah 2021



8.2Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari setia misi dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
						Target	Target			RPJMD	
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	2000	60,20%	1500	1600	1650	1700	1740	1765	1765	Diknas
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	15 Lembaga	64,34%	74	84	94	104	114	129	129	Diknas
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1700	73,95%	3310	3410	3460	3510	3550	3575	3575	Diknas
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	347	5,48%	50	75	100	110	115	120	120	Diknas
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	200	74,16%	116	140	160	165	180	185	185	Diknas
5	Jumlah pendidik pada PAUD	774	74,16%	590	614	626	638	650	662	662	Diknas
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	250	112	132	182	202	217	228	233	233	Diknas
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga	43	43,00%	50	80	90	100	110	120	120	Diknas



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	pemerintah yang berwenang										
B	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	10103	99,40%	10134	10164	10200	10230	10260	10280	10280	Diknas
C	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	4816	71,72%	4135	4234	4275	4875	5000	5100	5100	Diknas
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	97	67,38%	31	31	35	40	45	51	51	Diknas
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10103	10103	10164	10316	10326	10350	10345	10351	10351	Diknas
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4000	4000	3454	3506	3512	3521	3527	3531	3531	Diknas
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10103	10103	10164	10316	10325	10331	10335	10342	10342	Diknas
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4000	0,00	3454	3506	3517	3528	3545	3567	3567	Diknas
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	500	4000	586	706	826	946	1066	1186	1186	Diknas
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	400	77	482	532	582	632	682	732	732	Diknas
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	100	6,03	341	161	180	245	312	365	365	Diknas
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	50	2,06	161	80	40	20	10	5	5	Diknas
10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	30	0	39	40	41	42	43	44	44	Diknas
11	jumlah kebutuhan minimal	20	0	10	11	12	13	14	15	15	Diknas



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama										Diknas
12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	100	0	20	67	82	102	134	156	156	Diknas
13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	50	0	0	64	66	68	70	72	72	Diknas
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	30	1,64	27	30	35	40	45	50	50	Diknas
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	25	6,35	25	25	30	35	40	45	45	Diknas
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	91	84,26	84	92	94	98	102	104	104	Diknas
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38	52,63	12	8	6	5	4	4	4	Diknas
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	77	37,02	66	65	64	63	62	61	61	Diknas
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51	75,00	7	6	5	4	3	2	2	Diknas
D	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	250	95,24%	8250	8500	8550	8600	8650	8700	8700	Diknas



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
	dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan											
1	Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	1	100%	5	6	7	8	9	10	10		Diknas
2	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	644	0,00%	657	750	760	775	780	785	785		Diknas
3	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	717	0,00%	657	750	760	775	780	785	785		Diknas
4	Jumlah kebutuhan minimal Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	72	25,00%	15	15	15	20	15	15	15		Diknas
5	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	72	68,06%	49	56	72	78	86	94	94		Diknas
6	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	49	97,96	48	56	70	75	80	85	85		Diknas
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	53	49,07	25	30	35	40	45	50	50		Diknas
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	66,67	5	6	8	10	11	12	12		Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017												Diknas
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4896	46,96	2799	3778	3778	3784	3785	3790	3790		Diknas
2	Angka partisipasi kasar	21051	85,43	22551	23551	23551	23650	24150	24520	24520		Diknas
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	3735	4,60	4000	4500	4775	5000	5500	5850	5850		Diknas
4	Angka Partisipasi Murni	17931	90,81	908	907	907	907	908	905	905		Diknas
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	10083	99,20	10100	10120	10150	10300	10320	10350	10350		Diknas
6	Angka Partisipasi Murni (APM)	4580	95,10	4980	5480	5800	6240	6650	6900	6900		Diknas



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	SMP/MTs/Paket B										
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	3268	68,57	3500	3850	4000	4300	4850	5140	5140	Diknas
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			16883	19748	18125	18450	18900	19270	19270	Diknas
	Angka Partisipasi Sekolah:	14020	71,00	16883	19748	18125	18450	18900	19270	19270	Diknas
11	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	10166	88,52	9035	9345	9530	9880	10150	10500	10500	Diknas
12	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	3454	71,72	3489	300	800	1100	1350	1800	1800	Diknas
13	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	400	385,00	400	400	400	400	400	450	450	Diknas
14	Angka Putus Sekolah:	150	1,07	0,67%	0,40%	0.30%	0.25%	0.20%	0.10%	0.10%	Diknas
15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,25	0,42	0,30%	0,25%	0.22%	0.20%	0.15%	0.10%	0.10%	Diknas
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,01	2,43	2,02%	1,12%	1.01%	0.90%	0.75%	0.63%	0.63%	Diknas
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Diknas
	Angka Kelulusan:	100%	102,33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Diknas
19	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	102,32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Diknas
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	102,34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Diknas
21	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA									0	Diknas
	Angka Melanjutkan (AM):									0	Diknas
23	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	1401	85,74	1397	1350	1350	1300	1275	1500	1500	Diknas
24	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	1350	81,03	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2300	Diknas
	Fasilitas Pendidikan:									0	Diknas
27	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	100	91,35	100	108	1012	1020	1026	1031	1031	Diknas
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR									0	Diknas
29	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	30	71,05	32	38	41	45	47	49	49	Diknas
30	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	3	0,71	0,72	0,73	0,75	0,79	0,81	0,83	0,83	Diknas
31	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah									0	Diknas



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	pendidikan menengah										
32	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	417	7,63	341	76	78	80	85	88	88	Diknas
33	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diknas
34	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	60	34,45	60	65	70	75	80	85	85	Diknas
35	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diknas
36	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	1634	80,37	1666	1672	1685	1694	1703	1712	1712	Diknas
37	Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki- laki	8150	95,24	8250	8300	8350	8400	8450	8500	8500	Diknas
38	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diknas
39	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	536	0,00	110	150	1525	1550	1575	1600	1600	Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
Urusan Kesehatan											
A	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		0.39583	0.73611	0.73611	0.73611	0.73611	0.736111	0.736111	0.736111111	DKPP&KB
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		3	3	3	3	3	3	3	3	DKPP&KB
B	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		2	2	2	2	2	2	2	2	DKPP&KB
C	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		80,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik		Buku Kia: 1200 Kohort ibu : 7	Buku Kia: 2715	Buku Kia: 2588	Buku Kia: 3058	Buku Kia: 3788	Buku Kia: 4166	Buku Kia: 4582	Buku Kia: 4582	DKPP&KB
	kesehatan yang tersedia		PP test:	Kohort ibu : 110	Kohort ibu : 121	Kohort ibu : 143	Kohort ibu : 143	Kohort ibu : 143	Kohort ibu : 143	Kohort ibu : 143	



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
												Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
											Diknas	
			Stik Gula darah : Strip Hb : 0 stik protein : 0 TTD : 4.060 box	PPtest: 2715 pcs Stik GDS : 2715 pcs Strip Hb 2715 pcs stik protein : 2715 TTD :	PPtest: 2588 pcs Stik GDS : 2588 pcs Strip Hb : 2588 pcs stik protein : 2588 TTD :	PPtest: 3058 pcs Stik GDS : 3058 pcs Strip Hb : 3058pcs stik protein : 3058 TTD :	PPtest: 3788 pcs Stik GDS : 3788 pcs Strip Hb : 3788 pcs stik protein : 3788 TTD :	PPtest: 4166 pcs Stik GDS : 4166 pcs Strip Hb : 4166 pcs stik protein : 4166 TTD :	PPtest: 4582 pcs Stik GDS : 4582 pcs Strip Hb : 4582 pcs stik protein : 4582 TTD :	PPtest: 4582 pcs Stik GDS : 4582 pcs Strip Hb : 4582 pcs stik protein : 4582 TTD :		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		- Dokter : 28 -Perawat : 245 -Bidan : 185	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB	
D	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		91,6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Partograf : 0 Kartu ibu : 0 oksitosin Inject :	Partograf : 2246 lmbr Kartu ibu : 2446 oksitosin Inject :	Partograf : 2473 lembar Kartu ibu : 2473 oksitosin Inject :	Partograf : 2720 lembar Kartu ibu : 2720 oksitosin Inject :	Partograf : 2992 lembar Kartu ibu : 2992 oksitosin Inject :	Partograf : 3536 lembar Kartu ibu : 3536 oksitosin Inject :	Partograf : 4378 lembar Kartu ibu : 4378 oksitosin Inject :	Partograf : 4378 lembar Kartu ibu : 4378 oksitosin Inject :	DKPP&KB	
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		- Dokter : 28 -Perawat : 245 -Bidan : 185	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	PUSKESMAS - Dokter : 22 -Perawat : 100 -Bidan : 83 PUSTU -Bidan : 82 -Perawat : 82	DKPP&KB	
E	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		79,8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		kohrt bayi : 44 ex Vaksin Hb0 : Salep mata : 200 btl	Kohort bayi :44 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 20 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	Kohort bayi : 110 Vaksin Hb0 : - Salep mata : 200 tube	DKPP&KB	



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
		Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020						Diknas				
			Vit K1 : 3000 amp form MTBM : 0	Vit K1 : 3000 amp form MTBM : 0 lembar	Vit K1 : 2353 amp form MTBM : 1810 lembar	Vit K1 : 2780 amp form MTBM : 2139 lembar	Vit K1 : 3443 amp form MTBM : 2649 lembar	Vit K1 : 4384 amp form MTBM : 3373 lembar	Vit K1 : 5670 amp form MTBM : 4362 lembar	Vit K1 : 5670 amp form MTBM : 4362 lembar		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	DKPP&KB	
			- Dokter :	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22		
			-Perawat :	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100		
			-Bidan :	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83		
			PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU		
			-Bidan :	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82		
		-Perawat :	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82		
F	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		57,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Kohort : 49 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	Kohort : 110 ex	DKPP&KB	
			KPSP : 0	KPSP : 0 pcs	KPSP : 34 pcs	KPSP : 34 pcs	KPSP : 34 pcs	KPSP : 34 pcs	KPSP : 34 pcs	KPSP : 34 pcs		KPSP : 34 pcs
			DDTK : 0	DDTK : 0 ex	DDTK : 150 ex	DDTK : 150 ex	DDTK : 150 ex	DDTK : 150 ex	DDTK : 150 ex	DDTK : 150 ex		DDTK : 150 ex
			Vit A merah :	Vit A merah:16.310	Vit A merah: 19825	Vit A merah: 22599	Vit A merah: 24858	Vit A merah: 27344	Vit A merah:	Vit A merah:		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Vit A Biru :	Vit A Biru : 2125	Vit A Biru : 940	Vit A Biru : 1033	Vit A Biru : 110	Vit A Biru : 1222	Vit A Biru : 1443	Vit A Biru : 1443	DKPP&KB	
			- Dokter : 28	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS		
			-Perawat : 245	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22		
			-Bidan : 185	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100		
			-Gizi : 18	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83		
				-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22		
				PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU		
				-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82		
G	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		41,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
1	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		- Dokter : 28	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	DKPP&KB	
			-Perawat : 245	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22		
			-Bidan : 185	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100		
			-Gizi : 18	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83		
			-Kesmas : 20	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22		



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
				-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	
				PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	
				-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	
				-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	
H	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		31,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik		Pedoman dan Media KIE = 44	109	109	119	131	144	158	158	DKPP&KB
	kesehatan yang tersedia		Alat ukur BB, TB dan LP = 44	109	109	119	131	144	158	158	DKPP&KB
			Tensimeter = 44	109	109	119	131	144	158	158	DKPP&KB
			Glukometert = 44	109	109	119	131	144	158	158	DKPP&KB
			test strip gula darah = 44	47.164 Pcs	47.164 Pcs	51,88	57068	62775	690525	690525	DKPP&KB
			lanset = 44	109	109	119	131	144	158	158	DKPP&KB
			kapas alkohol = 44	47.164 Pcs	47.164 Pcs	51,88	57068	62775	690525	690525	DKPP&KB
			Kit IVA test = 44	13436	13436	14780	16258	17884	19672	19672	DKPP&KB
			form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan		Dokter = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	untuk pelayanan kesehatan		Bidan = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	sesuai standar		Perawat = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			Gizi = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			Tenaga kesehatan Masyarakat = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			Tenaga Non Kesehatan terlatih, kader = 25	40	50					0	DKPP&KB
I	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan		14,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK		Capaian Tahun 2020		Taget Capaian Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
			Target	Capaian	Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
1	sesuai standar											
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Rapor:	Rapor: 4583	Rapor: 5041	Rapor: 5545	Rapor: 6099	Rapor: 6708	Rapor: 7378	Rapor: 7378	DKPP&KB	
			AU :	AU : 18,332	AU : 19,659	AU : 28,834	AU : 31,714	AU : 34,881	AU : 38,365	AU : 38,365		
			Chol :	Chol : 18,332	Chol : 19,659	Chol : 28,834	Chol : 31,714	Chol : 34,881	Chol : 38,365	Chol : 38,365		
			GDS:	GDS: 18,332	GDS: 19,659	GDS: 28,834	GDS: 31,714	GDS: 34,881	GDS: 38,365	GDS: 38,365		
	Format:	Format:4583	Format: 5041	Format: 5545	Format: 6099	Format: 6708	Format: 7378	Format: 7378				
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		- Dokter : 28	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	PUSKESMAS	DKPP&KB	
			-Perawat : 245	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22	- Dokter : 22		
			-Bidan : 185	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100	-Perawat : 100		
			-Gizi : 18	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83	-Bidan : 83		
			-Kesmas : 20	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22	-Gizi : 22		
				-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21	-Kesmas : 21		
				PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU	PUSTU		
				-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82	-Bidan : 82		
				-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82	-Perawat : 82		
J	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		13,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik		a. Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE = 0	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
	kesehatan yang tersedia		b. Tensimeter = 44	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	1,09	DKPP&KB
			c. Form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM = 17	17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		a. Dokter = 17	17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			b. Bidan = 17	17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			c. Perawat = 17	17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			c. Tenaga kesehatan masyarakat = 17	17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
K	Persentase penderita DM yang mendapatkan		56,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
											Diknas
1	pelayanan kesehatan sesuai standar										
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		glukometer = 44	109	109	110	111	112	113	113	DKPP&KB
			Strip Tes Gula Darah = 44	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	DKPP&KB
			kapas alkohol = 44	109	109	110	111	112	113	113	DKPP&KB
			lanset = 44	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	47.164 Pcs	DKPP&KB
			form pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
2			Pedomnan dan media KIE = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	Jumlah SDM kesehatan		a. Dokter = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	untuk pelayanan kesehatan		b. Bidan = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	sesuai standar		c. Perawat = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			d. Gizi = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
L			e. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		53,95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik		buku pedoman PDPGJ = 0	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	kesehatan yang tersedia		KIT berisi 2 alat fiksasi = 0	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan		a.Dokter = 17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		b. Perawat yang terlatih = 6	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
M	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		88,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik		a. media KIE = 0							0	DKPP&KB
	kesehatan yang tersedia		b. Reagen Zn TB = 300	161	161	161	161	161	161	161	DKPP&KB
			c. Masker RT dan Masker N95 = 1180	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
		Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020									
			d. Pot dahak, kaca slide dan BHP = 43007	26438	26438	26438	26438	26438	26438	26438	DKPP&KB
			e. catridge Tes cepat molekuler = 1	2	2	2	2	2	2	2	DKPP&KB
			f. Form pencatatan dan pelaporan = 0							0	DKPP&KB
			g. buku pedoman/SOP = 0	20						0	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan		a. dokter terlatih = 7	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
	untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		b. ATLM = 11	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			c. Perawat = 7	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB
			d. Penata Rontgen = 1	2	2	2	2	2	2	2	DKPP&KB
		e. Tenaga kesehatan Masyarakat = 0	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB	
		f. Kader Tb = 0	218	218	218	218	218	218	218	DKPP&KB	
N	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		19,77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		a. media KIE = 70	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
			b. RDT HIV 1 = 100	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	DKPP&KB
			c. RDT HIV 2 = 50	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	DKPP&KB
			d. RDT HIV 3 = 50	2058	2058	2058	2058	2058	2058	2058	DKPP&KB
			e. RDT HBsAH = 300	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	DKPP&KB
			f. RDT Shypilis = 50	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	DKPP&KB
			g. RDT HIV dan Spypilis (DOU) = 925	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	DKPP&KB
			h. handschon = 200	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	DKPP&KB
			i. Alkohol swab =	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
			900								
			j. Blood lancet/jarum steril = 900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	DKPP&KB
			k. Disposable 3 CC = 900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	DKPP&KB
			l. Tabung Vacutainer = 900	2508	2508	2508	2508	2508	2508	2508	DKPP&KB
2	Jumlah SDM kesehatan		a. Dokter = 4	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
	untuk pelayanan kesehatan		b. Perawat = 10	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
	sesuai standar		c. Bidan = 10	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
			d. ATLM = 9	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
			e. Sarjana Kesehatan Masyarakat = 0	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
			f. Pendamping HIV = 0	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
			g. Penjangkau HIV = 0	20	20	20	20	20	20	20	DKPP&KB
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
A	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,17	2,00	1,86	1,82	1,79	1,73	1,73	DKPP&KB
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			21,9						0	DKPP&KB
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			16						0	DKPP&KB
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		67%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
5	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
B	serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK										
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR										DKPP&KB
1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	0,32	DKPP&KB
C	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		18,60%	7,92%	7,75%	7,43%	7,21%	7,14%	6,93%	0,0693	DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		11,3	13	13						DKPP&KB
2	Angka kelangsungan hidup bayi		DTT	DTT							DKPP&KB
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		13,3	24	22						DKPP&KB
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		6,9	11	11						DKPP&KB
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		62,5	200	195						DKPP&KB
6	Rasio posyandu per satuan balita		1,8	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.73611111	DKPP&KB
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.5659722	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.73611111	DKPP&KB
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		1 : 27170	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	1:10000	DKPP&KB
9	Rasio dokter per satuan penduduk		1 : 10000	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.73611111	DKPP&KB
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0.9027778	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.7361111	0.73611111	DKPP&KB
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		91,6%	95%	95%	97%	97%	100%	100%	1	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)		62,40%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	0,95	DKPP&KB
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)									0	DKPP&KB
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		71%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	0,95	DKPP&KB
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		1	1	1	2	2	2	2	2	DKPP&KB
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		58,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		202	245	245	245	245	245	245	245	DKPP&KB
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0	40%	40%	40%	40%	40%	40%	0,4	DKPP&KB
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		98,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		19,4%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0,9	DKPP&KB
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
25	Penderita diare yang ditangani		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
26	Angka kejadian Malaria		0	1	1	2	3	4	5	5	DKPP&KB
27	Tingkat kematian akibat malaria		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	DKPP&KB
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		DTT	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0,8	DKPP&KB
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari		0,30%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,005	DKPP&KB



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	total populasi										Diknas
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		DTT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		DTT	80%	80%	80%	80%	80%	80%	0,8	DKPP&KB
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		11,03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
34	Cakupan kunjungan bayi		66,3%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	1	DKPP&KB
35	Cakupan puskesmas		DTT	DTT						0	DKPP&KB
36	Cakupan pembantu puskesmas		DTT	DTT						0	DKPP&KB
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		80,3%	95%	95%	97%	97%	97%	100%	1	DKPP&KB
38	Cakupan pelayanan nifas		82,9%	95%	95%	97%	97%	97%	100%	1	DKPP&KB
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
40	Cakupan pelayanan anak balita		57,1%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	0,95	DKPP&KB
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin		DTT							0	DKPP&KB
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		37,8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		71,77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
46	Persentase balita gizi buruk		5,8%	< 15%	< 15%	< 15%	< 15%	Mengikuti Renstra Pusat		0	DKPP&KB
47	Prevalensi balita gizi kurang		3,3%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%			0	DKPP&KB
48	Cakupan Desa Siaga Aktif		DTT							0	DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021										0	DKPP&KB
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		0.3958333	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	0.736111111	DKPP&KB
2	Persentase rumah sakit		66,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	rujukan tingkat Kabupaten/ kota yang terakreditasi										
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.		80,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan.		91,6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		79,8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
6	Pelayanan Kesehatan Balita		57,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		41,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)		62,5	200	195	195	195	195	195	195	DKPP&KB
16	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun		DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DTT	DKPP&KB
17	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan		71%	90%	90%	95%	95%	97%	97%	0,97	DKPP&KB
18	Prevalensi stunting (pendek dan		14,47%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	Mengikuti Renstra Pusat		0	DKPP&KB



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target					
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
19	sangat pendek) pada balita									0	DKPP&KB	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada		4,33%	< 15%	< 15%	< 15%	< 15%					
	balita (persen)											
20	Insidensi TB per 100.000 penduduk		367	400	400	400	400	400	400	400	DKPP&KB	
21	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV		20%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,5	DKPP&KB	
22	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)		DTT	30%	30%	30%	50%	50%	50%	0,5	DKPP&KB	
23	Treatment coverage pada pasien TB		59,28%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	0,85	DKPP&KB	
24	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan		65%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	0,95	DKPP&KB	
25	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai stand		80%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	1	DKPP&KB	
26	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun		DTT	25%	25%	25%	25%	25%	20%	0,2	DKPP&KB	
27	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)		17	17	17	17	17	17	17	17	DKPP&KB	
28	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)		20%	30%	30%	35%	40%	40%	50%	0,5	DKPP&KB	
29	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		100%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
30	Persentase Sarana Produksi U MOT		0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DKPP&KB	
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											0	DKPP&KB
1	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR)		50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%	0,56	DKPP&KB	
2	Angka prevalensi kontrasepsi		50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%	0,56	DKPP&KB	



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	modern/modern Contraceptive (mCPR)										
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		41%	39%	38%	37%	36%	35%	34%	0,34	DKPP&KB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	
A	Rasio konektivitas kabupaten/kota		66.1	70	70	72	74	76	78	78	DISHUB
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		60	90	100	100	100	100	100	100	DISHUB
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala		1021	400	500	500	500	500	500	500	DISHUB
3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		70	100	100	100	100	100	100	100	DISHUB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	DISHUB
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		91	100	110	120	130	140	150	150	DISHUB
2	Rasio ijin trayek		0.42	1	1	1	1	1	1	1	DISHUB
3	Jumlah uji kir angkutan umum		510	300	300	300	300	300	300	300	DISHUB
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		16	20	20	20	20	20	20	20	DISHUB
5	Persentase layanan angkutan darat		0.44	1	1	1	1	1	1	1	DISHUB
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		43	50	50	50	50	50	50	50	DISHUB
7	Pemasangan Rambu- rambu		0	100	100	150	200	250	300	300	DISHUB
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0.35	1	1	1	1	1	1	1	DISHUB
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		133	150	180	190	200	210	220	220	DISHUB
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		339	350	400	450	500	520	550	550	DISHUB
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	DPUPR. PERKIM
A	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi		0,1	0,12	0,137	0,156	0,175	0,195	0,21	0,21	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
											Diknas
B	oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota										
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		162.967,43 Ha	143291,6 Ha	140.517,43 Ha	137.491,78 Ha	134.416,73	131.117,24 Ha	128.256,93 Ha	128.256,93 Ha	DPUPR. PERKIM
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		25.78	23.78	19.85	14.55	10.159	8.635	4	4000	DPUPR. PERKIM
C	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0,17	0,34	0,34	0,56	0,79	1,13	2,27	2,27	DPUPR. PERKIM
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0,149	0,259	0,37	0,519	0,574	0,629	0,685	0,685	DPUPR. PERKIM
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0,477	0,542	0,602	0,701	0,788	0,923	1	1	DPUPR. PERKIM
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0,318	0,55	0,564	0,786	0,832	0,921	1	1	DPUPR. PERKIM
D	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		0,57	0,80	0,20	40	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DPUPR. PERKIM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	(Ada/Tidak)										
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)				1 BUMD					0	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM				0,10	20	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.				HIBAH	HIBAH	HIBAH	HIBAH	HIBAH	HIBAH	DPUPR. PERKIM
E	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		80	100	20	40	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S				20	40	55	85	100	100	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T				20	45	50	75	100	100	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T				20	30	50	70	100	100	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				20	40	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa				20	40	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
6	pengolahan lumpur tinja										
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				20	45	50	70	100	100	DPUPR. PERKIM
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar				20	50	60	75	100	100	DPUPR. PERKIM
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman				20	60	75	80	100	100	DPUPR. PERKIM
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman				20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				20	55	65	80	100	100	DPUPR. PERKIM
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				20	40	55	75	100	100	DPUPR. PERKIM
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				20	30	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				20	40	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				20	45	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
F	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi				20	45	60	85	100	100	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting				20	45	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)				20	55	60	85	100	100	DPUPR. PERKIM
4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung				20	60	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	(Ada/Tidak)										Diknas
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				20	60	75	80	100	100	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi				20	50	75	80	100	100	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota				20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat				20	40	85	85	100	100	DPUPR. PERKIM
G	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	0,50	0,52	0,53	0,54	0,56	0,58	0,6	0,6	0,6	DPUPR. PERKIM
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	1043,2	DPUPR. PERKIM
2	Panjang jalan yang dibangun	-	1,9 Km	7,80	14,00	45,13	45,13	50,13	5,013,333,333		DPUPR. PERKIM
3	3. Panjang jembatan yang dibangun	-	-	0	0,945	0,436666667	0,436666667	8,075	8,075		DPUPR. PERKIM
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	20,73 km	45,235 Km	47,57	58,09	82,32	71,24	93,62	9,361,666,667		DPUPR. PERKIM
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	-	-	-	58,09	82,32	71,24	93,62	9,361,666,667		DPUPR. PERKIM
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	120 m	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
8	Panjang jalan yang dipelihara	101,83 Km	50 Km	22,50	9,60	23,10	23,10	23,10	23,1		DPUPR. PERKIM
9	Panjang jembatan yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPR. PERKIM
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT											



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Penyediaan danv rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	20	40	60	80	100	100	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	0	20	50	70	80	100	100	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	3.979 Unit	4.479 Unit	4.979 Unit	5.479 Unit	5.979 Unit	6.479 Unit	6.479 Unit	DPUPR. PERKIM
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	3.975 KK	4.475 KK	4.975 KK	5.475 KK	5.975 KK	6.475 KK	6.475 KK	DPUPR. PERKIM
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.479 Unit	1.679 Unit	1.879 Unit	2.079 Unit	2.279 Unit	2.279 Unit	DPUPR. PERKIM
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	1.000 Unit	1.100 Unit	1.200 Unit	1.300 Unit	1.400 Unit	1.400 Unit	DPUPR. PERKIM
B	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	DPUPR. PERKIM
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		72	122	172	222	272	322	372	372	DPUPR. PERKIM
2	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		5 Ha							0	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
C	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		0,21 Ha	0,28 Ha	0,58 Ha	0,88 Ha	1,18 Ha	1,48 Ha	1,78 Ha	1,78 Ha	DPUPR. PERKIM
	1 Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		9,19 Ha	8,91 Ha	8,61 Ha	8,31 Ha	8,01 Ha	7,71 Ha	7,41 Ha	7,41 Ha	DPUPR. PERKIM
	2 Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		-	46 Unit	96 Unit	146 Unit	196 Unit	246 Unit	296 Unit	296 Unit	DPUPR. PERKIM
	3 Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		0,21 Ha	0,27 Ha	0,33 Ha	0,39 Ha	0,45 Ha	0,51 Ha	0,57 Ha	0,57 Ha	DPUPR. PERKIM
D	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		7,50%	7,75%	8%	8,25%	8,50%	8,75%	9%	0,09	DPUPR. PERKIM
	1 1. Jumlah rumah di kab/kota		17.697 Unit	17.797 Unit	17.897 Unit	17.997 Unit	18.097 Unit	18.197 Unit	18.297 Unit	18.297 Unit	DPUPR. PERKIM
2	2. Jumlah unit PK RTLH		-	46 Unit	96 Unit	146 Unit	196 Unit	246 Unit	396 Unit	396 Unit	DPUPR. PERKIM
3	3. Jumlah rumah tidak layak huni		1.337 Unit	1.291 Unit	1.241 Unit	1.191 Unit	1.041 Unit	991 Unit	941 Unit	941 Unit	DPUPR. PERKIM
4	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni		-							0	DPUPR. PERKIM
5	5. Rasio rumah dan KK		1 / 1,12	1 / 1,11	1 / 1,10	1 / 1,09	1 / 1,08	1 / 1,07	1 / 1,06	1 / 1,06	DPUPR. PERKIM
6	6. Jumlah rumah pembangunan baru		35 Unit	35 Unit	85 Unit	135 Unit	185 Unit	235 Unit	285 Unit	285 Unit	DPUPR. PERKIM
E	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)										DPUPR. PERKIM
	6 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		150 unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	DPUPR. PERKIM
Urusan ARG											
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
Pekerjaan Umum											
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0,076	0,096	0,144	0,143815916	0,191754554	0,239693193	0,287631831	0,287631831	DPUPR. PERKIM



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011542121	DPUPR. PERKIM	
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		9,17%	9,17%	9,17%	7,34%	6,42%	5,50%	4,59%	0,04587156	DPUPR. PERKIM	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		7,59%	10,00%	15,00%	20%	25%	30%	35%	0,35	DPUPR. PERKIM	
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		1,24%	1,24%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	DPUPR. PERKIM	
6	Rasio Jaringan Irigasi		40,39	42,43	53,76	56,15	70,58	74,45	81,25	81,25	DPUPR. PERKIM	
7	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		600	620	650	660	670	675	680	680	DPUPR. PERKIM	
Penataan Ruang:												
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0,06	0,1	0,14	0,18	0,22	0,25	0,28	0,28	DPUPR. PERKIM	
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		0,37%	1,17%	4,58%	7,45%	20,58%	33,73%	46,85%	46,85%	DPUPR. PERKIM	
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,017	0,025	0,034	0,042	0,05	0,059	0,068	0,068	DPUPR. PERKIM	
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya		0	0	0	0	0	0	0	0	DPUPR. PERKIM	
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	DPUPR. PERKIM	
6	Ketaatan terhadap		48,37%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	DPUPR. PERKIM	
	RTRW											
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2020												
1	Persentase luas sawah beririgasi		25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	0,55	DPUPR. PERKIM	
2	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun		1.659 Ha	1.759 Ha	1.875 Ha	1.957 Ha	2.040Ha	2.139 Ha	2.258Ha	2.258Ha	DPUPR. PERKIM	
3	Luas jaringan daerah irigasi		120 Ha	165 Ha	205 Ha	315 Ha	340 Ha	400 Ha	475 Ha	475 Ha	DPUPR.	



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi										PERKIM
4	Panjang Infrastruktur		5 Km	8 Km	12 Km	16 Km	20 Km	22 Km	25 Km	25 Km	DPUPR. PERKIM
	pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun										
	Urusan Pertanahan										
	1	Jumlah Kepala Keluarga	129523 Kepala							0	DPUPR. PERKIM
	penerima akses Reforma Agraria	Keluarga									
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang								0	DPUPR. PERKIM
3	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi	42422 Hektar								0	DPUPR. PERKIM
	pembangunan untuk										
	Kepentingan Umum dan										
	Kepentingan Lainnya										
Urusan Transmigrasi										0	DPUPR. PERKIM
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)								0	DPUPR. PERKIM
	2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)							0	DPUPR. PERKIM
	Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										Satpol-PP
	A	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		59	59	59	59	59	59	59	59	Satpol-PP
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		70 Orang	100 Orang	130 Orang	160 Orang	190 Orang	210 Orang	240 Orang	240 Orang	Satpol-PP
3	Jumlah Perda dan Perkada		9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	9 Perda	Satpol-PP



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	yang ditegakkan										Diknas
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	Satpol-PP
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	Satpol-PP
6	Tersedianya sarana prasarana minimal		6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Satpol-PP
B	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
C	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		3 Pos	3 Pos	4 Pos	4 Pos	4 Pos	4 Pos	4 Pos	4 Pos	Satpol-PP
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	Satpol-PP
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		3 Pos	3 Pos	3 Pos	3 Pos	3 Pos	3 Pos	3 Pos	3 Pos	Satpol-PP
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman,		14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	Satpol-PP



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
6	penyelamatan dan evakuasi										
	Jumlah aparaturnya pemadam		58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	58 orang	Satpol-PP
	kebakaran yang memenuhi										
	Standar Kualifikasi Pemadam										
	sebagaimana dimaksud										
	Peraturan Menteri Dalam										
	Negeri Nomor 16 Tahun 2009										
tentang Standar Kualifikasi											
Aparatur Pemadam											
Kebakaran											
7	Jumlah relawan kebakaran		40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Satpol-PP
	di bawah binaan Dinas										
	Pemadam Kebakaran dan										
	Penyelamatan atau perangkat										
	daerah yang										
menyelenggarakan sub											
urusan kebakaran											
8	Jumlah peningkatan		72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	72 orang	Satpol-PP
	kapasitas aparaturnya pemadam										
	kebakaran										
G	Waktu tanggap		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
	(response time)										
	penanganan kebakaran										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	Satpol-PP
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	470 Orang	Satpol-PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	51 Pelanggaran	Satpol-PP
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	14,71%	0,1471	Satpol-PP
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
5	Persentase Penegakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
	PERDA										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2022										0	Satpol-PP
1	Persentase gangguan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	Trantibum yang dapat diselesaikan										
2	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
3	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
4	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
5	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Satpol-PP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	BPBD
A	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota									0	BPBD
1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			45.105 Jiwa	43.000 Jiwa	42.000 Jiwa	41.000 Jiwa	40.000 Jiwa	39.000 Jiwa	39.000 Jiwa	BPBD
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			Tidak tersedia anggaran	43.000 Jiwa	42.000 Jiwa	41.000 Jiwa	40.000 Jiwa	39.000 Jiwa	39.000 Jiwa	BPBD
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	BPBD
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			200 Jiwa	10.000 Jiwa	11.000 Jiwa	12.000 Jiwa	13.000 Jiwa	14.000 Jiwa	14.000 Jiwa	BPBD
5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		250 Orang	40 Orang	40 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	BPBD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat										
2	Persentase korban bencana yang			10%	70%	75%	80%	85%	90%	0,9	BPBD



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
						Target	Target			RPJMD	Diknas
	dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021										0	BPBD
1	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			200 Jiwa	43.000 Jiwa	42.000 Jiwa	41.000 Jiwa	40.000 Jiwa	39.000 Jiwa	39.000 Jiwa	BPBD
2	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi			300 Orang	1.200 Orang	2.000 Orang	2.800 Orang	2.800 Orang	2.636 Orang	2.636 Orang	BPBD
4	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial			1 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	1 Pokmas	BPBD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
URUSAN SOSIAL											
A	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		0%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	1	DP3AS
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		1	1	1	1	1	1	1	1	DP3AS
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		50 orang	50 orang	100 orang	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
3	JumlahTim Reaksi Cepat yang dibentuk		1 Tim	1 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	3 Tim	DP3AS
4	Jumlah penyandang		0	0	50 orang	50 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau										
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		3 Kendaraan	3 Kendaraan	4 Kendaraan	4 Kendaraan	4 Kendaraan	4 Kendaraan	4 Kendaraan	4 Kendaraan	DP3AS
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		0	0	1	1	2	2	2	2	DP3AS
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		0	0	50 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	DP3AS
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		0	0	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh	10 bh	DP3AS
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		0	0	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	DP3AS
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		0	0	15 Orang	15 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	DP3AS
13	Jumlah tenaga kesehatan		0	0	2 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	DP3AS



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	yang disediakan di rumah singgah										Diknas
14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		20 Orang	50 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	DP3AS
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		0	0	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	DP3AS
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS
20	Jumlah penyandang		0	0	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	DP3AS



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											Diknas
21	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia		0	0	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	DP3AS
	terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga										
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia										
	terlantar dan gepeng yang dirujuk										
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK											
A	Persentase ARG pada belanja langsung APBD										
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		0	15	20	25	30	35	40	40	DP3AS
2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		0	5	20	20	20	20	20	20	DP3AS
B	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten										
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		3	3	3	3	3	3	3	3	DP3AS
2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		3	3	3	3	3	3	3	3	DP3AS
3	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		1	6	6	7	7	10	10	10	DP3AS
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas		0	1	2	3	4	5	6	6	DP3AS



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
						Target	Target			RPJMD	Diknas
C	oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)										
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)										
	1 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		2	20	20	25	25	30	30	30	DP3AS
	2 Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		40	60	40	40	40	40	40	40	DP3AS
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	10	10	10	10	10	10	10	DP3AS
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		0	0	5	5	5	5	5	5	DP3AS
	Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										
	SOSIAL										
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial										
2	Persentase PMKS yang tertangani										
Pemberdayaan Perempuan											
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		20	20	20	25	25	30	30	30	DP3AS
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		20	20	20	25	25	30	30	30	DP3AS



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		0	0	1	2	2	2	2	2	2	DP3AS
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021												
1	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan											
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		5	5	5	5	10	10	10	10	10	DP3AS
3	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan yang komprehensif		1	3	3	3	5	5	5	5	5	DP3AS
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
A	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dinas Ketahan Pangan
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		-	-	1 Gudang (Untuk di Kabupaten)	2 Lumbung (1 Kecamatan untuk 2 Desa)	4 Lumbung (3 Kecamatan untuk 4 Desa)	6 Lumbung (3 Kecamatan untuk 6 Desa)	8 Lumbung (3 Kecamatan untuk 8 Desa)	8 Lumbung (3 Kecamatan untuk 8 Desa)	8 Lumbung (3 Kecamatan untuk 8 Desa)	Dinas Ketahan Pangan
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	1 Dokumen Laporan Pemantauan Pasokan Pangan	Dinas Ketahan Pangan
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	Dinas Ketahan Pangan
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		1 KWT	4 KWT	6 KWT	7 KWT	8 KWT	8 KWT	8 KWT	8 KWT	8 KWT	Dinas Ketahan Pangan
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		2 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Ketahan Pangan



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
6	Tertanganinya kerawanan pangan		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	Dinas Ketahan Pangan
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan		-	-	-	30 Ton	50 Ton	80 Ton	100 Ton	100 Ton	Dinas Ketahan Pangan
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	30 Sampel	Dinas Ketahan Pangan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Ketersediaan pangan utama		9752	9780	9760	9870	9800	9950	9970	9970	Dinas Ketahan Pangan
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita		Energi : 2.401 kal/kap/hari	Energi : 2.405 kal/kap/hari	Energi : 2.401 kal/kap/hari	Energi : 2.401 kal/kap/hari	Energi : 2.412 kal/kap/hari	Energi : 2.416 kal/kap/hari	Energi : 2.420 kal/kap/hari	Energi : 2.420 kal/kap/hari	Dinas Ketahan Pangan
			Protein : 62,3 gr/kap/hari	Protein : 62,40 gr/kap/hari	Protein : 62,80 gr/kap/hari	Protein : 62,50 gr/kap/hari	Protein : 62,80 gr/kap/hari	Protein : 62,90 gr/kap/hari	Protein : 63.10 gr/kap/hari	Protein : 63.10 gr/kap/hari	Dinas Ketahan Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	52 Sampel	Dinas Ketahan Pangan
4	Penguatan cadangan pangan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Dinas Ketahan Pangan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021										0	Dinas Ketahan Pangan
1	Persentase cadangan pangan masyarakat		3%	4%	4%	6%	6%	8%	8%	0,08	Dinas Ketahan Pangan
			5%	6%	7%	7%	7%	7%	7%	0,07	Dinas Ketahan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan		PPH Ketersediaan = 80,30% PPH Konsumsi = 85,5%	PPH Ketersediaan = 80,35% PPH Konsumsi = 89,20%	PPH Ketersediaan = 80,38% PPH Konsumsi = 92,80%	PPH Ketersediaan = 80,40% PPH Konsumsi = 96,4%	PPH Ketersediaan = 80,80% PPH Konsumsi = 100%	PPH Ketersediaan = 81,00% PPH Konsumsi = 100%	PPH Ketersediaan = 81,30% PPH Konsumsi = 100%	PPH Ketersediaan = 81,30% PPH Konsumsi = 100%	Dinas Ketahan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan		57,70%	57,70%	57,70%	57,70%	57,70%	57,70%	57,70%	0,577	Dinas Ketahan Pangan



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	pangan										Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		81,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	DLH
1	Indeks kualitas air (IKA)		50,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	54,00	54,00	DLH
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		84,00	87,00	88,00	89,00	90,00	92,00	85,00	85,00	DLH
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		102,00	102,00	102,00	103,00	103,00	104,00	102,00	102,00	DLH
B	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		88,60	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	89,00	DLH
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		1	2	2	2	2	2	2	2	DLH
C	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		60,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	DLH
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DLH
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		-	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	DLH
3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DLH
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DLH
5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
						Target	Target			RPJMD	Diknas
	PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		-	1	1	1	1	1	1		DLH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas	sama dengan Row A.1 diatas		DLH
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas	sama dengan Row A.2 diatas		DLH
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas	sama dengan Row A.3 diatas		DLH
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas	sama dengan Row C diatas		DLH
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas	sama dengan Row C.2 diatas		DLH
12	Penetapan hak MHA		sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas	sama dengan Row C.3 diatas		DLH
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas	sama dengan Row C.4 diatas		DLH
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		1	1	1	1	1	1	1		DLH
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas	sama dengan Row C.5 diatas		DLH
18	Timbulan sampah yang ditangani		sama dengan Row	sama dengan Row	sama dengan Row B	sama dengan Row B	sama dengan Row B	sama dengan Row B	sama dengan Row B		DLH



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
			B diatas	B diatas	diatas	diatas	diatas	diatas	diatas		
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		DLH
20	Persentase cakupan area pelayanan		9,2	9,2	11,03	12,86	14,69	16,52	18,35		DLH
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani		sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas	sama dengan Row B diatas		DLH
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Perekaman KTP elektronik		95,14%	95,31%	95,79%	96%	97%	98%	99%	0,99	Dukcapil
	B	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	39,77%	40%	45%	47%	49%	50%	53%	0,53	Dukcapil
C		Kepemilikan akta kelahiran	82,64%	85%	90%	92%	94%	96%	97%	0,97	Dukcapil
	D	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0%	1,92%	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	13,46%	0,1346	Dukcapil
1		Penerbitan akta perkawinan	60,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
2		Penerbitan akta perceraian	62,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
3	Penerbitan akta kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
4	Penyajian data kependudukan		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	Dukcapil
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk		59,16%	60,10%	65,10%	67%	69%	71%	73%	0,73	Dukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran		67,38%	70,10%	75,30%	77%	79%	81%	83%	0,83	Dukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah		58,14%	70,15%	80,10%	82%	83%	84%	85%	0,85	Dukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		88,10%	90%	95%	96%	97%	98%	99%	0,99	Dukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		6,05%	8,05%	8,09%	8,30%	8,60%	8,90%	9%	0,09	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17										0	Dukcapil



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
Tahun 2021											
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun		82,64%	85%	90%	92%	94%	96%	97%	0,97	Dukcapil
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		60,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan		62,04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Dukcapil
6	Pemanfaatan data kependudukan		0%	1,92%	5,76%	7,69%	9,61%	11,53%	13,46%	0,1346	Dukcapil
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	DPMD
A	Persentase pengentasan Desa tertinggal		55%	10 Desa	15 Desa	10 Desa	100%	100%	100%	1	DPMD
B	Persentase peningkatan status desa mandiri		46,00%	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	DPMD
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		109	17 Desa	19 Desa	21 Desa	25 Desa	27 Desa	27,52%	27,52%	DPMD
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		18	-	18 Desa	19 Desa	20 Desa	21 Desa	22 Desa	22 Desa	DPMD
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		#####	388 Lembaga	400 Lembaga	450 lembaga	460 lembaga	470 Lembaga	475 Lembaga	475 Lembaga	DPMD



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
4	Jumlah peningkatan desa		#####	378 Lembaga	380 Lembaga	385 Lembaga	390 Lembaga	395 Lembaga	397 Lembaga	397 Lembaga	DPMD
	yang lembaga										
	kemasyarakatan dan lembaga										
	adatnya melaksanakan										
	kegiatan ekonomi produktif										
	dan pemberdayaan										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	109 JUMLAH KANTOR PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		#####	44 Lembaga	55 Lembaga	68 Lembaga	80 Lembaga	90 Lembaga	95 Lembaga	95 Lembaga	DPMD
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	35,2	60 KELOMPOK BINAAN PKK	78 KELOMPOK BINAAN PKK	80 KELOMPOK BINAAN PKK	109 KELOMPOK BINAAN PKK	125 KELOMPOK BINAAN PKK	127 KELOMPOK BINAAN PKK	127 KELOMPOK BINAAN PKK	127 KELOMPOK BINAAN PKK	DPMD
4	Persentase LSM aktif	25	2JUMLAH LSM AKTIF	3 JUMLAH LSM AKTIF	4 JUMLAH LSM AKTIF	5 JUMLAH LSM AKTIF	6 JUMLAH LSM AKTIF	7 JUMLAH LSM AKTIF	7 JUMLAH LSM AKTIF	7 JUMLAH LSM AKTIF	DPMD
5	Persentase LPM Berprestasi		#####	36 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	38 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	40 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	45 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	50 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	55 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	55 JUMLAH KELOMPOK BINAAN LPM	DPMD
6	Persentase PKK aktif	35,2	70 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	109 KELOMPOK BINAAN PKK	115 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	125 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	125 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	125 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	125 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	125 JUMLAH KELOMPOK BINAAN PKK	DPMD
7	Persentase Posyandu aktif		#####	52 JUMLAH POSYANDU AKTIF	60 JUMLAH POSYANDU AKTIF	68 JUMLAH POSYANDU AKTIF	60 JUMLAH POSYANDU AKTIF	109 JUMLAH POSYANDU AKTIF	123 UMLAH POSYANDU AKTIF	123 UMLAH POSYANDU AKTIF	DPMD
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	3500	-	19076 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19077 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19078 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19079 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19080 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19080 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	19080 JUMLAH SWADAYA MASYARAKAT	DPMD
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	136,25	-	545 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	560 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	568 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	570 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	575 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	575 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	575 JUMLAH PROGRAMSWADAYA MASYARAKAT	DPMD
										0	DPMD
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2022										0	DPMD
1	Jumlah aparatur dan			2197 ORANG	2197 ORANG	2197ORANG	2197 ORANG	2197 ORANG	2197 ORANG	2197 ORANG	DPMD
	pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes										
2	Jumlah kelembagaan desa			808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	808 LEMBAGA	DPMD



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target					
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
3	yang ditata sesuai standar											
	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan			654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	654 SISTEM PELAYANAN	DPMD	
	desa yang ditata sesuai standar											
4	Jumlah Desa Mandiri			4 DESA	3 DESA	3 DESA	5 DESA	4 DESA	4 DESA	4 DESA	DPMD	
5	Jumlah Desa Berkembang			6 DESA	8 DESA	6 DESA	10 DESA	10 DESA	DESA	DESA	DPMD	
6	Jumlah Desa Tertinggal			10 DESA	15 DESA	10 DESA	100 DESA	100 DESA	100	100	DPMD	
7	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang		2 BUMDes	9 BUMDes	10 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	DPMD	
										0	Dinas Perhubungan	
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	Diskominfo	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											0	Diskominfo
A	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo	
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	7,818,181,818	Diskominfo	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	85,45	8,545,454,545	Diskominfo	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Diskominfo	



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
B	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	3,333,333,333	Diskominfo
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain		50	50	50	50	50	50	50	50	Diskominfo
	Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015										
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		7,27	7,27	7,27	10,91	12,73	14,55	16,36	1,636,363,636	Diskominfo
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	1,090,909,091	Diskominfo
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91	1,090,909,091	Diskominfo
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		2,38	2,38	2,38	4,76	4,76	4,76	4,76	4,761,904,762	Diskominfo
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42	Diskominfo
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,380,952,381	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah										Diknas
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,090,909,091	Diskominfo
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,090,909,091	Diskominfo
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	3,333,333,333	Diskominfo
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,380,952,381	Diskominfo
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,380,952,381	Diskominfo
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		0,06	0,03	0,06	0,14	0,14	0,14	0,29	0,287769784	Diskominfo
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Diskominfo
C	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		95,41	95,41	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan		0	51,35	100	100	100	100	100	100	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota										
2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot		0	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)										
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		0	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
URUSAN STATISTIK										0	Diskominfo
A	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		50	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
1	Tersedianya buku profil daerah		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Diskominfo
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		1	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik		100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral		100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
URUSAN PERSANDIAN										0	Diskominfo
A	Tingkat keamanan informasi pemerintah		90	90	90	90	90	90	90	90	Diskominfo
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah		90	90	90	90	90	90	90	90	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	kegiatan strategis yang harus diamankan										Diknas
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,761,904,762	Diskominfo
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		0	0	0	0	0	4,76	4,76	4,761,904,762	Diskominfo
4	Persentase titik yang daiamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	Diskominfo
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan		0	0	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	2,666,666,667	Diskominfo
	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan										
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		95,41	95,41	96,33	97,25	98,17	99,08	100	100	Diskominfo
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		84,45	84,45	90	90	90	90	90	90	Diskominfo
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		55,49	55,49	55,49	60	60	60	60	60	Diskominfo
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		4,34	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5	Diskominfo
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021										0	Diskominfo
1	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah		78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	7,818,181,818	Diskominfo
2	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,380,952,381	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan										Diknas
3	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan		2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,380,952,381	Diskominfo
4	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	Diskominfo
5	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan		78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	78,18	7,818,181,818	Diskominfo
6	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah		0	0	10	10	10	10	10	10	Diskominfo
7	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah		0	0	0	30	30	30	30	30	Diskominfo
8	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi		85%	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
9	Persentase tingkat kepuasan		92%	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja	Perangkat
		Target	Capaian	Target	Target	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
						Target	Target			RPJMD	Diknas
	Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										
	masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah										
	10 Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		85%	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	11 Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah		51,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	Diskominfo
Urusan Statistik											
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		50	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
Urusan Persandian											
1	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D		2	1	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
2	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah		0	0	1	1	1	1	1	1	Diskominfo
3	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah		0	0	1	1	1	1	1	1	Diskominfo



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	Berbasis Elektronik (SPBE))										Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		-1	0,8	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	DPMPTSP
1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		-	4	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
2	Kegiatan pameran penanaman modal		-	-	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
3	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		-	-	1	2	2	2	2	2	DPMPTSP
4	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		3 org	4 org	6 org	5 org	10 org	12 org	18 org	18 org	DPMPTSP
	oran realisasi penanaman modal										
			(2 kali pertemuan)	(3 kali pertemuan)	(3 kali pertemuan)	(5 kali pertemuan)	(6 kali pertemuan)	(6 kali pertemuan)	(8 kali pertemuan)	(8 kali pertemuan)	DPMPTSP
5	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		399	400	410	415	420	425	430	430	DPMPTSP
6	Laporan realisasi penanaman modal		4	4	4	4	4	4	4	4	DPMPTSP
7	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota				24 org	24 org	24 org	24 org	24 org	24 org	DPMPTSP
8	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN				2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
9	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota		3 pengaduan	4 pengaduan	5 pengaduan	6 pengaduan	8 pengaduan	10 pengaduan	12 pengaduan	12 pengaduan	DPMPTSP
			10 konsultasi	15 konsultasi	20 konsultasi	22 konsultasi	24 konsultasi	25 konsultasi	26 konsultasi	26 konsultasi	DPMPTSP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		1	2	2	2	2	2	2	2	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94000000000	DPMPTSP
3	Rasio daya serap tenaga kerja		4,6	4,4	4,3	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	DPMPTSP
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94000000000	DPMPTSP
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2022											
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal		92.077.500.000	90.050.000.000	80.500.000.000	91.100.000.000	92.000.000.000	93.000.000.000	94.000.000.000	94000000000	DPMPTSP



No		Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Taget Capaian Kinerja			Kondisi Kinerja	Perangkat
			Target	Capaian	Target	Target	Target	Target	Target	pada akhir periode	Daerah
										RPJMD	Diknas
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,56%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,0084	Dispora
	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		16 Orang	25 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	Dispora
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		11,90%	10,88%	4,53%	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,0578	Dispora
1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda		54 Orang	52 Orang	280 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	Dispora
	Peningkatan prestasi olahraga		0	0	7 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	Dispora
	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional										
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		6 Cabor	0	7 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	Dispora
	Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										
	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif		97%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	0,9
2	Persentase wirausaha muda		0,30%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,0084	Dispora
3	Cakupan pembinaan olahraga		0	0	0	30%	30%	30%	30%	0,3	Dispora
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		0	40%	50%	50%	50%	50%	50%	0,5	Dispora
5	Cakupan pembinaan atlet muda		0	0	0	0	0	0	0	0	Dispora
6	Jumlah atlet berprestasi		0	2 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	5 Cabor	Dispora
7	Jumlah prestasi olahraga		0	0	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	8 Cabor	Dispora
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021											
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi			Sama dengan Row diatas						0	Dispora



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan										
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		Sama dengan Row diatas							0	Dispora
3	Peningkatan prestasi olahraga		Sama dengan Row diatas							0	Dispora
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan										
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		4	4	6	8	8	8	8	8	Dusbudpar
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		3	3	5	6	6	6	6	6	Dusbudpar
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datangke kabupaten/kota		1.531 Orang	10%	15%	20%	25%	30%	35%	0,35	Dusbudpar
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		-	2	3	3	4	6	8	8	Dusbudpar
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		1,82%	1,82%	1,84%	1,84%	1,85%	1,85%	1,86%	0,0186	Dusbudpar
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		6,83%	1,30%	9,20%	9,80%	10,50%	11,80%	12%	0,12	Dusbudpar
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		11 Orang	20 Orang	35 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang	70 Orang	Dusbudpar
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		-	1	1	2	3	4	5	5	Dusbudpar
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		-	-	3	-	-	-	-	-	Dusbudpar
7	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		-	2	4	6	8	10	12	12	Dusbudpar



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
8	Persentase SDM peserta		80 Orang	25%	30%	40%	50%	65%	80%	0,8	Dusbudpar
	pembekalan sektor										
	kepariwisataan										
9	Jumlah lokasi yang		4 Ds. Wisata	5	6	6	6	6	6	6	Dusbudpar
	memperoleh pemberdayaan										
	masyarakat dan pembinaan										
	kemitraan usaha										
	masyarakat										
KEBUDAYAAN											
A	Terlestarikannya Cagar										
	Budaya										
1	Jumlah obyek pemajuan		43	2	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
	kebudayaan yang dilindungi										
	(inventarisasi, pengamanan										
	pemeliharaan, penyelamatan										
	dan publikasi)										
2	Jumlah obyek pemajuan		-	-	1	1	1	1	1	1	Dusbudpar
	kebudayaan yang dikembangkan										
	(penyebarluasan,										
	pengkajian, penayaan										
	keberagaman)										
3	Jumlah obyek pemajuan		-	-	11	3	2	2	2	2	Dusbudpar
	kebudayaan yang										
	dimanfaatkan (membangun										
	karakter										
	bangsa,meningkatkan										
	ketahanan budaya,mdan										
	meningkatkan kesejahteraan										
	masyarakat										
4	Jumlah SDM, lembaga dan		-	10	10	10	10	10	10	10	Dusbudpar
	pranata yang dibina										
	(peningkatan kompetensi,										
	standarisasi dan sertifikasi,										
	serta peningkatan kapasitas										
	tata kelola)										
5	Register cagar budaya		27	-	1	1	1	1	-	-	Dusbudpar
	(pendaftaran,										
	pengjasian,penetapan,										
	pencatatan,										
	pemeringkatan,										
	penghapusan)										



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
6	Perlindungan cagar budaya		-	1	1	1	1	1	1	1	Dusbudpar
	Kabupaten (penyelamatan,										
	zonasi, pemeliharaan dan										
	pemugaran										
8	Pengembangan cagar		-	-	-	1	1	1	1	1	Dusbudpar
	budaya Kabupaten (penelitian,										
	revitalisasi, adaptasi)										
9	Pemanfaatan cagar budaya		-	-	-	1	-	1	-	-	Dusbudpar
	provinsi (dalam hal agama,										
	sosial, pendidikan, ilmu										
	pengetahuan, teknologi,										
10	kebudayaan, dan pariwisata)										
	Pembentukan tim										
	pendaftaran cagar budaya										
11	Pembentukan tim ahli cagar		-	-	-	5	-	-	-	-	Dusbudpar
	budata provinsi										
12	Fasilitas sertifikasi tim ahli		-	2	3	-	-	-	-	-	Dusbudpar
	cagar budya										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											
	Kebudayaan										
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			2	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		27	-	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		16	-	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		-	-	-	-	-	1	1	1	Dusbudpar
	Pariwisata										
1	Kunjungan wisata		1.542 Orang	1.550 Orang	1.560 Orang	1.570 Orang	1.580 Orang	1.590 Orang	1.600 Orang	1.600 Orang	Dusbudpar
2	PAD sektor pariwisata		4.459.191.421	805.470.000						0	Dusbudpar
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021											
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai		-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0,2	Dusbudpar
	pelaku/pendukung										
	pertunjukan seni										
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang		43	2	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	dilindungi										Diknas
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0,2	Dusbudpar
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan		16	-	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni		-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0,2	Dusbudpar
6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		27	-	2	2	2	2	2	2	Dusbudpar
7	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)		-	3	5	7	9	11	13	13	Dusbudpar
8	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		80 Orang	25%	30%	40%	50%	65%	80%	0,8	Dusbudpar
9	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0,2	Dusbudpar
10	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		-	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0,2	Dusbudpar
Urusan Pariwisata											
1	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara		1.531 Orang	1.539 Orang	1.544 Orang	1.547 Orang	1.562 Orang	1.577 Orang	1.593 Orang	1.593 Orang	Dusbudpar
INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017											
Perpustakaan :											
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	4	247	4	5	6	7	8	9		perpustakaan
2	Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	38	38	40	50	55	60	65	70		perpustakaan



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
3	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	98	99	100	100	100	100	100	100		perpustakaan
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	8	6	5		5		5			perpustakaan
5	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	10	10	15	16	15	16	15	16		perpustakaan
6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	3	3								perpustakaan
Kearsipan :											
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	65%	71%	80	90	80	90	80	90		perpustakaan
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	17	17	20	26	20	26	20	26		perpustakaan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020										0	Perikanan
A	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)		137,14	243	254	265	276	288	300	300	Perikanan
	kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)										
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		13 RTP	16 RTP	19 RTP	22 RTP	25 RTP	28 RTP	31 RTP	31 RTP	Perikanan
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional		0%	0%	0%	25%	35%	45%	100%	1	Perikanan
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan		0 IUP	0 IUP	1 IUP	1 IUP	1 IUP	1 IUP	1 IUP	1 IUP	Perikanan
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan		146 Orang	180 Orang	200 Orang	220 Orang	240 Orang	260 Orang	280 Orang	280 Orang	Perikanan



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
5	penguatan kelembagaan)										
	Jumlah benih budidaya air		151.000 Ekor	500	700	900	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1500000	Perikanan
	tawar dan air payau yang di produksi										
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	Perikanan
1	Produksi perikanan		137,14	243	254	265	276	288	300	300	Perikanan
2	Konsumsi ikan			30,66	32,19	33,8	35,49	37,27	39,13	39,13	Perikanan
3	Cakupan bina kelompok nelayan		100	23,08	13,33	11,76	10,53	9,52	8,7	8,7	Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan		69,72	27,98	27,56	27,17	26,81	26,38	26	26	Perikanan
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		119	85	87	90	92	95	97	97	Perikanan
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perikanan
7	Nilai tukar nelayan		102,74	102,8	102,91	102,95	102,99	1103,02	103,05	103,05	Perikanan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021											
1	Produksi Perikanan Tangkap		95,62	68	70	72	74	76	78	78	Perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya		41,52	175	184	193	202	212	222	222	Perikanan
	Jumlah		137,14	243	254	265	276	288	300	300	Perikanan
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
A	Produktivitas pertanian		Padi = 2,96	3	3,5	3,7	3,8	4	4	4	Pertanian
	per hektar per tahun		Jagung = 3,35	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4	Pertanian
			Ubi Kayu = 40,53	40,6	40,6	40,9	41,9	42,9	43,9	43,9	Pertanian
			Ubi Jalar = 7,67	7	8	8	9	9	9	9	Pertanian
1	Sarana pertanian yang diberikan		5	30	60	70	80	90	100	100	Pertanian
2	Prasarana pertanian yang digunakan		7	20	30	35	40	45	50	50	Pertanian
4	Persentase prasarana yang digunakan		7	26	30	35	40	45	50	50	Pertanian
B	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	0,03	Pertanian
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017											



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		3.386,87	3.454,47	4.525,58	3.596,96	3.366,89	3.742,70	3.817,55	3817,55	Pertanian
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB									0	Pertanian
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		3.386,87	3.454,47	4.525,58	3.596,96	3.366,89	3.742,70	3.817,55	3817,55	Pertanian
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		Padi = 2,96	3	3,5	3,7	3,8	4	4	4	Pertanian
			Jagung = 3,35	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4	4	Pertanian
			Ubi Kayu = 40,53	40,6	40,6	40,9	41,9	42,9	43,9	43,9	Pertanian
			Ubi Jalar = 7,67	7	8	8	9	9	9	9	Pertanian
5	Cakupan bina kelompok petani		322	350	375	400	425	450	475	475	Pertanian
6	Produksi sektor Perkebunan (TON)		Sawit = 7951	8348,55	8765,97	9204,26	9664,48	10147,7	10655,09	10655,09	Pertanian
			Kopi = 33	34,65	36,38	38,2	40,11	42,11	44,223	44,223	Pertanian
			Kakao = 153	160,65	168,68	177,11	185,97	195,27	205,034	205,034	Pertanian
			Karet = 150,6	158,13	166,03	174,33	183,05	192,2	201,818	201,818	Pertanian
			Lada = 7	7,35	7,72	8,1	8,51	8,91	9,36	9,36	Pertanian
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2022											
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)		Padi = 2,96	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	1	Pertanian
			Jagung = 3,35	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,052,631,579	Pertanian
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)			1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
3	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan		Sawit = 7951	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	Pertanian
			Kopi = 33	0,95	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,050,178,105	Pertanian
			Kakao = 153	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,050,002,561	Pertanian
			Karet = 150,6	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,050,041,623	Pertanian
			Lada = 7	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,050,505,051	Pertanian
4	persentase peningkatan produktivitas peternakan		Sapi Potong = 29,95 Ton	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	Pertanian
			Ayam Broiler = 594,78 Ton	0,043	0,045	0,046	0,047	0,048	0,05	0,05	Pertanian
			Telur Ayam Ras = 24.1 Ton	0,05	0,051	0,051	0,052	0,052	0,053	0,053	Pertanian
5	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana		Kec. Malinau Utara Tanaman Pangan (Padi) =	65%	68%	70%	73%	75%	85%	0,85	Pertanian



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	OPT		60%								Diknas
6	Persentase wilayah yang		Kec. Malinau Kota = 66	67,90%	70,02%	72,11%	75,27%	77,50%	79,8	79,8	Pertanian
	terkendali dari penyakit		Kec. Malinau Utara =4,10	4,20%	4,40%	4,56%	4,61%	4,75%	5,25	5,25	Pertanian
	hewan menular strategis		Kec. Malinau Barat = 2,88	2,97%	3,90%	3,96%	4,08%	5,10%	4,89	4,89	Pertanian
			Kec. Mentarang= 2,16	2,20%	2,30%	2,35%	2,42%	2,51%	2,59	2,59	Pertanian
Usuran Kopراسi Usaha Kecil dan Menengah											
A	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		6,50%	8%	12%	16%	19%	23%	27%	0,27	Perindag
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		2%	3%	5%	6%	8%	9%	11%	0,11	Perindag
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		1,60%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	Perindag
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		18,30%	19%	23%	27%	31%	35%	39%	0,39	Perindag
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		6,5%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	0,12	Perindag
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	8%	12%	16%	19%	23%	27%	0,27	Perindag
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasianuntuk		0%	15%	15,58%	16,16%	16,74%	17,33%	17,91%	17,91%	Perindag



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota										Diknas
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0,02	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		9,8%	12%	13%	16%	19%	23%	27%	0,27	Perindag
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0,01	Perindag
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	0,18	Perindag
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	0,18	Perindag
B	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		2,49%	3,49%	3,74%	3,99%	4,23%	4,48%	,4,73%	,4,73%	Perindag
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		22,44%	22,69%	22,94%	23,19%	23,44%	23,69%	23,94%	23,94%	Perindag



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		10%	9,97%	14,96%	19,95%	24,93%	29,92%	34,91%	34,91%	Perindag
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		2.49%	2,74%	2,99%	3,24%	3,49%	3,74%	3,99%	3,99%	Perindag
6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		9,97%	14,96%	17,45%	19,95%	22,44%	24,97%	27,43%	27,43%	Perindag
7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
Urusan Perdagangan										0	Perindag
A	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS /SIUP Toko Swalayan)									0	Perindag
1	Persentase penerbitan TDG		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
2	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG		0%	10%	20%	30%	30%	30%	30%	0,3	Perindag
3	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,5	Perindag
5	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,5	Perindag
6	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		22,22%	30%	40%	50%	70%	80%	100%	1	Perindag
C	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP)bertanda tera sah yang berlaku		0%	25%	25%	50%	60%	80%	100%	1	Perindag
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang		0%	25%	25%	50%	60%	80%	100%	1	Perindag



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											
	ditera/tera ulang dalam tahun berjalan										Diknas
Perindustrian											
A	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi										
B	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									0	Perindag
C	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan		0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
D	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
E	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	1	Perindag



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target				
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020											Diknas
F	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota										
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota		0%	0%	0%	20%	25%	30%	35%	0,35	Perindag
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017										0	Perindag
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah										0	Perindag
1	Persentase koperasi aktif		65%	66%	70%	72%	74%	75%	80%	0,8	Perindag
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	0,99	Perindag
	Perdagangan										
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,05	Perindag
	Perindustrian									0	Perindag
1	Cakupan bina kelompok pengrajin		0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,05	Perindag
2	Pertumbuhan Industri		5,28%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	0,05	Perindag
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021											
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah											
Urusan Perdagangan											Perindag
2	Tertib Usaha		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,1	Perindag
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0,1	Perindag
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0,5	Perindag



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target			
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Perindag	
8	Inflasi Pangan bergejolak		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	Perindag	
Urusan Perindustrian												Perindag
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		-0,38%	0%	1%	1,2%	1,5%	1,7%	2%	0,02	Perindag	
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB		2,56%	2,60%	2,70%	2,70%	2,80%	3,00%	3,00%	0,03	Perindag	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		2456 org	2542 org	2628 org	2714 org	2800 org	2886 org	2972 org	2972 org	Perindag	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)		194.805.600.000	195.430.100.000	196.054.100.000	196.679.100.000	197.303.600.000	197.303.600.000	19.792.810.000	19792810000	Perindag	
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												BPBJ
A	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		87%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	0,9	BPBJ	
B	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		100%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	1	BPBJ	
C	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		33%	50%	50%	60%	70%	80%	90%	0,9	BPBJ	
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												BPKD
A	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		22,74%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	26,00%	0,26	BPKD	
B	Rasio PAD		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,01	BPKD	
C	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,0308	BPKD	
D	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan		3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,0308	BPKD	



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja		Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah	
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target					
Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												Diknas
E	Intern Pemerintah (APIP)											
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		55,33%	62,83%	63,00%	64,00%	65,00%	66,00%	67,00%	0,67	BPKD	
F	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	
Manajemen Keuangan											BPKD	
A	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		82,70%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	0,88	BPKD	
B	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		92,68%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	96,00%	97,00%	0,97	BPKD	
C	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKD	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKD	
			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BPKD	
D	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		71,84%	71,00%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	0,76	BPKD	
Transparansi dan Partisipasi Publik											BPKD	
A	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	BPKD	
B	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	BPKD	
Indikator Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020											BKPP	
A	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1,56%	2,29%	1,30%	1,20%	1,10%	1%	0,90%	0,009	BKPP	
B	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		0,0043%	0,0082%	0,1500%	0,0250%	0,0350%	0,0450%	0,0550%	0,00055	BKPP	
C	Rasion Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1%	0,526%	1%	1%	1%	1%	1%	0,01	BKPP	
Indikator Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017											BKPP	
1	Rata - rata lama pegawai		2,5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	BKPP	



No	Indikator/ IKK	Capaian Tahun 2020		Tahun 2021 Target	Tahun 2022 Target	Taget Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Diknas
		Target	Capaian			Tahun 2023 Target	Tahun 2024 Target	Tahun 2025 Target	Tahun 2026 Target		
		Indikator berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020									
	mendapatkan pendidikan dan pelatihan										
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	0,0283	BKPP
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		10,38%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	0,45	BKPP
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		32	33	33	33	33	33	33	33	BKPP
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		155	155	155	155	155	155	155	155	BKPP
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		10	300	320	340	360	380	400	400	BKPP

Sumber diolah 2021

